

BAB II

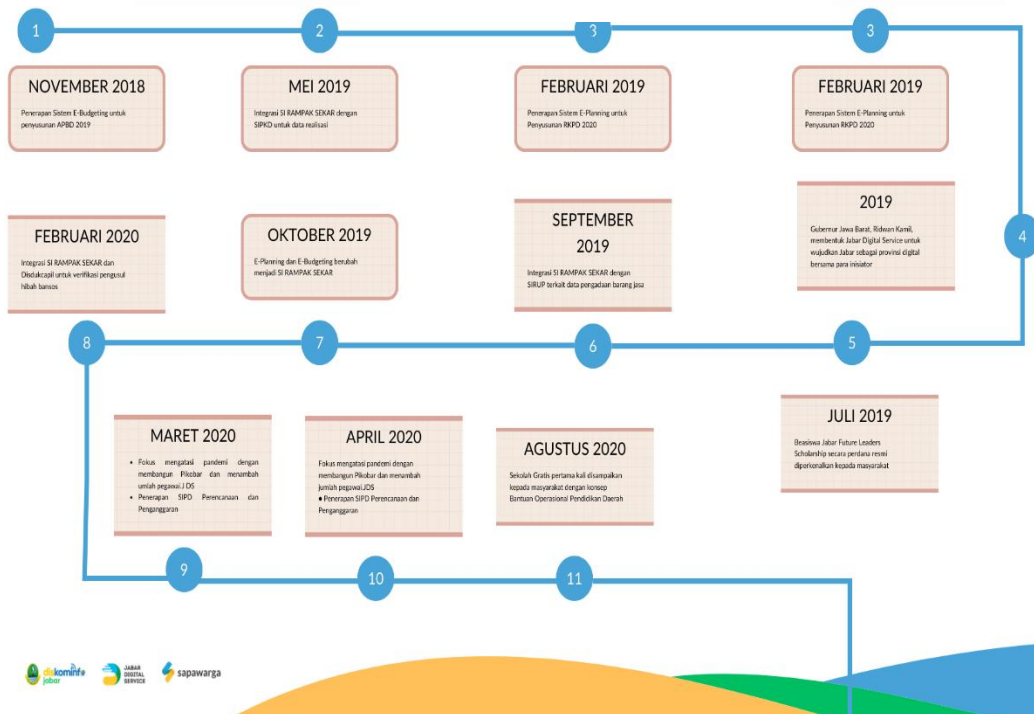
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

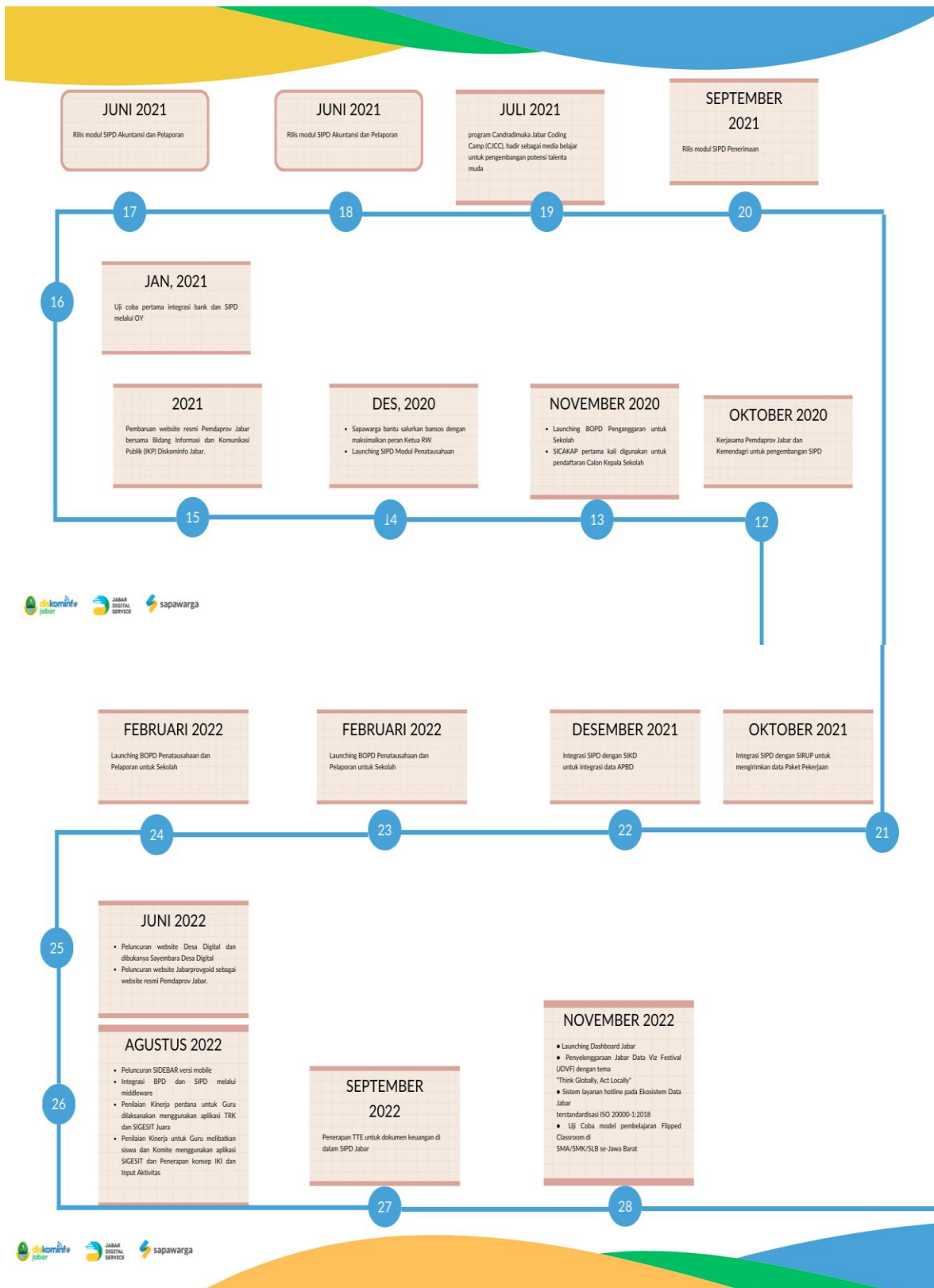
Jabar Digital Service (JDS) atau Unit Pelaksana Teknis Pengelola Layanan Daerah Digital, Data, dan Informasi Geospasial adalah sebuah unit di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang dicita-citakan dapat mempersempit kesenjangan digital, membantu efisiensi dan akurasi pengambilan kebijakan berbasis data dan teknologi, serta merevolusi pemakaian teknologi dalam kehidupan masyarakat serta pemerintahan di Jawa Barat [9].



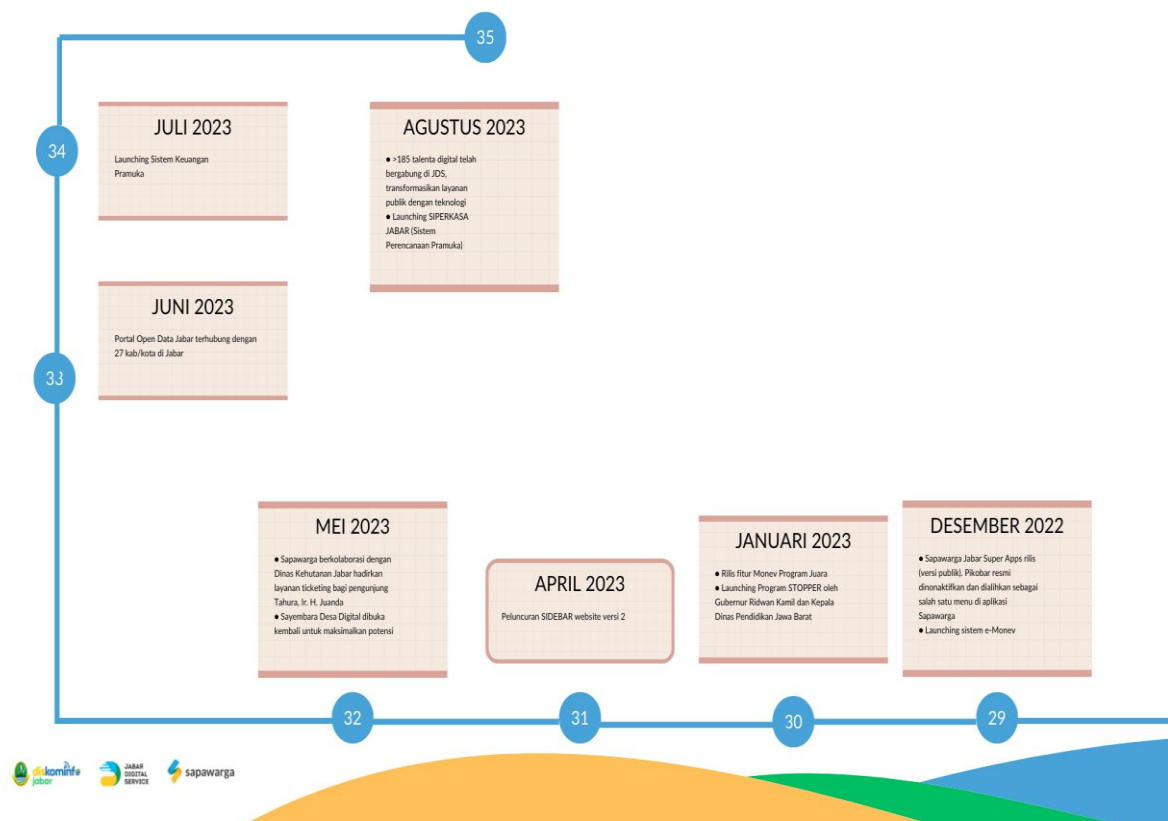
Gambar 2 1 Logo Jabar Digital Service



Gambar 2 2 Linimasa Jabar Digital Service



Gambar 2 3 Linimasa Jabar Digital Service



Gambar 2 4 Linimasa Jabar Digital Service

Perusahaan Jabar Digital Service didirikan pada November 2018 dengan penerapan sistem E-Budgeting untuk penyusunan APBD 2019. Selanjutnya, pada Mei 2019, dilakukan integrasi SI RAMPAK SEKAR dengan SIPKD untuk pengelolaan data realisasi. Hingga Agustus 2023, semua fitur dan sistem yang dibutuhkan telah siap untuk diluncurkan. Aplikasi yang dirancang oleh perusahaan ini diberi nama SapaWarga Super Apps, yang awalnya digagas oleh Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Bapak H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. Aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga Jawa Barat serta mendukung dinas terkait dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem secara efektif.

SapaWarga Super Apps dikembangkan sebagai solusi digital yang mengintegrasikan berbagai layanan publik di Jawa Barat. Dengan pendekatan one-stop service, aplikasi ini memungkinkan warga untuk mengakses informasi penting, layanan administrasi, serta berbagai program sosial yang disediakan oleh pemerintah daerah. Fitur-fitur seperti laporan warga, informasi bansos, dan layanan kependudukan telah dioptimalkan untuk memberikan pengalaman yang lebih mudah dan responsif.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat, Jabar Digital Service terus melakukan inovasi dan perbaikan pada sistem yang telah dibangun. Kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintahan dan mitra teknologi menjadi salah satu strategi utama dalam memastikan keberlanjutan serta efisiensi dari layanan yang diberikan. Proses pengembangan dilakukan dengan pendekatan user-centric, memastikan bahwa setiap fitur yang ditambahkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pengguna. Dalam operasionalnya, Jabar Digital Service juga menerapkan big data analytics untuk memahami kebutuhan warga serta meningkatkan efektivitas kebijakan daerah. Dengan memanfaatkan data secara optimal, pemerintah dapat mengambil keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making) yang lebih akurat dan tepat sasaran. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur digital di Jawa Barat.

Ke depan, Jabar Digital Service berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan dukungan teknologi berbasis cloud computing dan artificial intelligence (AI), sistem yang dikembangkan diharapkan semakin efisien, aman, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa kendala. Selain itu, upaya dalam meningkatkan literasi digital bagi warga juga menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan pemanfaatan teknologi yang maksimal dan berkelanjutan.

2.1.1 Visi Misi

Adapun Visi yang tertera di Jabar Digital Service adalah Menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi terdepan dalam penggunaan data dan teknologi untuk mendukung layanan publik dan perumusan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan inovatif. Untuk mendukung visi tersebut terdapat 3 aspek utama misi adalah :



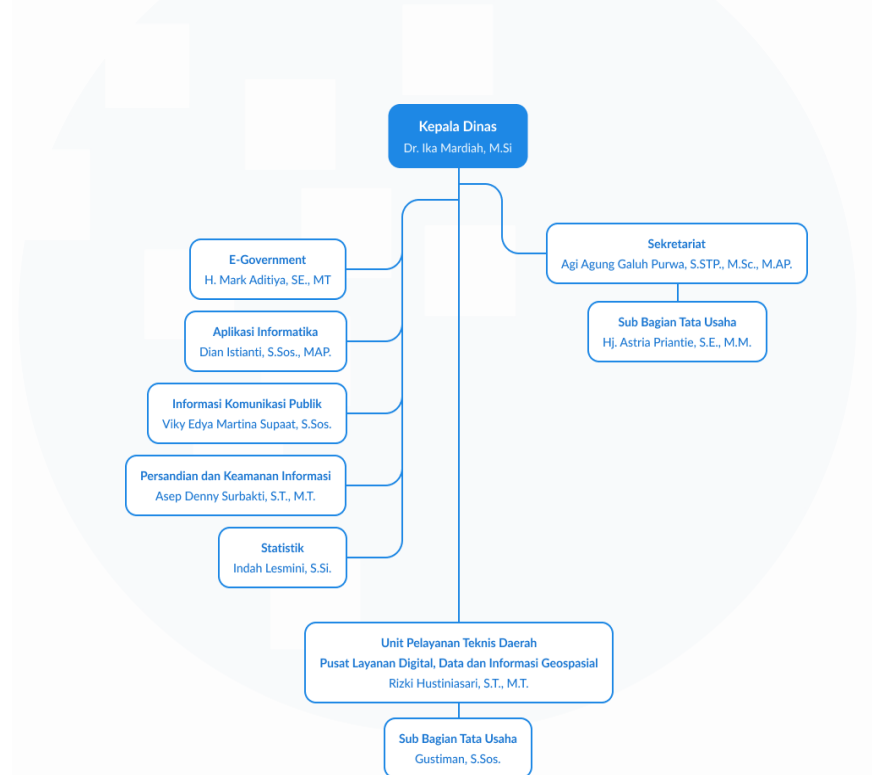
Gambar 2.5 Misi Jabar Digital Service

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah komponen krusial dalam suatu lembaga atau instansi karena menunjukkan pembagian tugas, tanggung jawab, serta jalur koordinasi antar bagian di dalamnya. Dalam konteks ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung berbagai fungsi strategis, mulai dari pengelolaan teknologi informasi, perkembangan e-government, hingga penyediaan layanan data dan informasi kepada publik.

Struktur organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mengawasi beberapa bidang utama, termasuk bidang E-Government, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Persandian dan Keamanan Informasi, Statistik, serta Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD). Selain itu, terdapat Sekretariat yang mencakup beberapa sub bagian tata usaha sebagai dukungan untuk operasional internal. Dengan adanya struktur ini, Diskominfo Jawa Barat mampu melaksanakan perannya secara efektif dalam mengelola informasi dan komunikasi pemerintahan, serta menawarkan layanan digital yang inovatif bagi masyarakat.

Gambar berikut menunjukkan struktur organisasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat:



Gambar 2 6 Struktur Perusahaan Dinas Komunikasi & Informatika Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi yang ditampilkan dalam gambar ini menggambarkan susunan kepemimpinan serta pembagian tugas dalam sebuah instansi Dinas Komunikasi & Informatika Jawa Barat. Di tingkat tertinggi, terdapat Kepala Dinas yang memegang tanggung jawab atas koordinasi dan penetapan kebijakan strategis seluruh instansi. Di bawahnya, terdapat Sekretariat yang berperan dalam pengelolaan administrasi, koordinasi internal, dan mendukung kelancaran operasional instansi. Sekretariat juga mencakup Sub Bagian Tata Usaha, yang bertugas menangani aspek administratif serta operasional sehari-hari. Selanjutnya, terdapat beberapa bidang yang menangani aspek teknis dan operasional:

- 1) **E-Government**, yang berfokus pada pengembangan layanan digital pemerintahan guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.
- 2) **Aplikasi Informatika**, Bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan tujuan mendukung operasional dan pelayanan publik.
- 3) **Informasi Komunikasi Publik**, yang bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi dan merancang strategi komunikasi antara instansi dan masyarakat.
- 4) **Persandian dan Keamanan Informasi**, yang berfungsi dalam perlindungan data, pengamanan informasi, serta pengurangan risiko siber.
- 5) **Statistik**, yang memiliki tanggung jawab dalam pengumpulan, analisis, dan penyajian data statistik untuk mendukung perencanaan serta pengambilan keputusan yang berbasis data.

Selain itu, terdapat Unit Pelayanan Teknis Daerah yang fokus pada pengelolaan layanan digital, data, dan informasi geospasial. Unit ini bertujuan untuk mendukung kebijakan berbasis data dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Di bawahnya terdapat Sub Bagian Tata Usaha yang berperan penting dalam mendukung administrasi dan operasional unit teknis.

Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan terwujudnya koordinasi yang efektif dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyediaan layanan berbasis digital. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik secara keseluruhan.